

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN KONTEN LOKAL PADA KEBIJAKAN
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ) DI WILAYAH LAYANAN BANTEN
PADA KPID PROVINSI BANTEN**

Talitha Almira 248080021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kepatuhan konten lokal pada kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan Banten pada KPID Provinsi Banten. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi, dengan fokus pada pengalaman dan pemaknaan pelaku penyiaran serta regulator dalam menjalankan kebijakan SSJ. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SSJ di wilayah Banten masih menghadapi tantangan signifikan, antara lain dominasi konten terpusat, keterbatasan sumber daya, dan kurang optimalnya koordinasi antara lembaga penyiaran dan regulator. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan konten lokal meliputi komunikasi kebijakan, kepentingan industri media, struktur organisasi, dan pengawasan regulatif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan sosial dalam implementasi kebijakan SSJ di wilayah layanan Banten pada KPID Provinsi Banten.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan Konten Lokal, Sistem Stasiun Jaringan, Kualitatif Fenomenologi, Wilayah Layanan Banten

**IMPLEMENTATION OF LOCAL CONTENT COMPLIANCE IN THE
NETWORK STATION SYSTEM (SSJ) POLICY IN THE BANTEN SERVICE
AREA AT THE BANTEN PROVINCE KPID**

Talitha Almira 248080021

ABSTRACT

This study aims to understand the implementation of local content compliance with the Network Station System (SSJ) policy in the Banten service area of the Banten Provincial KPID. The approach used is qualitative phenomenology, focusing on the experiences and meanings of broadcasters and regulators in implementing the SSJ policy. Data were collected through semi-structured interviews, observations, documentation, and literature studies, then analyzed thematically through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that the implementation of the SSJ policy in the Banten region still faces significant challenges, including the dominance of centralized content, limited resources, and less than optimal coordination between broadcasters and regulators. Factors influencing local content compliance include policy communication, media industry interests, organizational structure, and regulatory oversight. This study also emphasizes the importance of contextual and social understanding in the implementation of the SSJ policy in the Banten service area of the Banten Provincial KPID.

Keywords: Policy Implementation, Local Content Compliance, Network Station System, Qualitative Phenomenology, Banten Service Area

**IMPLEMENTASI PATUH KONTEN LOKAL DINA KAWIJAKAN
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ) DI DAERAH LAYANAN BANTEN
DI KPID PROVINSI BANTEN**

Talitha Almira 248080021

RINGKESAN

Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun ngartos palaksanaan patuh kana eusi lokal kana kawijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan KPID Propinsi Banten. Pamarekan anu dianggo nyaéta fenomenologi kualitatif, fokus kana pangalaman sareng harti panyiar sareng régulator dina ngalaksanakeun kawijakan SSJ. Data dikumpulkeun ngaliwatan wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, sareng studi literatur, teras dianalisis sacara tématis ngaliwatan tahapan pangumpulan, réduksi, presentasi, sareng nyieun kacindekan. Hasilna nunjukkeun yén palaksanaan kawijakan SSJ di wilayah Banten masih nyanghareupan tantangan anu signifikan, kalebet dominasi eusi terpusat, sumber daya anu terbatas, sareng koordinasi anu kirang optimal antara panyiar sareng régulator. Faktor-faktor anu mangaruhan patuh kana eusi lokal kalebet komunikasi kawijakan, kapentingan industri média, struktur organisasi, sareng pangawasan pangaturan. Panalungtikan ieu ogé nekenkeun pentingna pamahaman kontekstual sareng sosial dina palaksanaan kawijakan SSJ di wilayah layanan KPID Propinsi Banten.

Kecap konci: Palaksanaan Kebijakan, Patuh Eusi Lokal, Sistem Stasiun Jaringan, Kualitatif Fenomenologi, Wewengkon Layanan Banten

A. KONTEKS PENELITIAN

Perkembangan industri penyiaran di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya regulasi penyiaran yang menekankan prinsip demokratisasi media. Reformasi di sektor penyiaran tidak hanya bertujuan mengubah struktur kepemilikan media, tetapi juga menciptakan sistem penyiaran yang lebih adil, beragam, dan mencerminkan kepentingan publik. Media penyiaran, khususnya televisi, memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, menyebarluaskan informasi, serta memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sistem penyiaran memerlukan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri media dan kepentingan publik (McQuail, 2010: 73).

Salah satu langkah penting dalam reformasi sistem penyiaran di Indonesia adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi ini menegaskan bahwa spektrum

frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Undang-undang tersebut juga mengatur berbagai prinsip dasar penyiaran, termasuk keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi siaran (*diversity of content*). Prinsip tersebut menjadi landasan bagi pembentukan sistem penyiaran yang lebih demokratis dan tidak terpusat pada kelompok tertentu (Morissan, 2018: 52).

Dalam kerangka implementasi undang-undang tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Sistem ini merupakan mekanisme penyiaran yang mengharuskan lembaga penyiaran televisi nasional untuk bekerja sama dengan stasiun televisi lokal dalam menyiarkan program kepada masyarakat di berbagai daerah. Dengan sistem ini, stasiun televisi tidak lagi dapat melakukan siaran secara terpusat dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia tanpa melibatkan stasiun lokal. Sebaliknya, lembaga penyiaran diwajibkan membangun jaringan dengan stasiun

lokal sehingga terdapat ruang bagi produksi dan penyiaran konten daerah (Armando, 2011: 115).

Tujuan utama dari penerapan Sistem Stasiun Jaringan adalah untuk mendorong pemerataan informasi dan memperkuat keberagaman konten lokal dalam sistem penyiaran nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat daerah untuk memproduksi dan menayangkan konten yang mencerminkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah masing-masing. Dengan demikian, media penyiaran tidak hanya menjadi sarana distribusi informasi dari pusat ke daerah, tetapi juga menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat lokal (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012: 64).

Salah satu aspek penting dalam implementasi Sistem Stasiun Jaringan adalah kewajiban penyiaran konten lokal. Regulasi penyiaran mengharuskan stasiun televisi jaringan untuk menyediakan porsi tertentu dari waktu siaran mereka bagi program yang diproduksi secara lokal. Ketentuan ini dimaksudkan

untuk memastikan bahwa masyarakat daerah memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Selain itu, penyiaran konten lokal juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya daerah serta penguatan identitas lokal dalam konteks keberagaman nasional (Masduki, 2007: 143).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak lembaga penyiaran televisi yang masih bergantung pada produksi konten dari pusat karena alasan efisiensi biaya dan keterbatasan sumber daya produksi di daerah. Produksi program televisi membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dalam bentuk peralatan teknis, sumber daya manusia, maupun biaya operasional. Kondisi ini sering kali menyebabkan stasiun televisi jaringan lebih memilih menyiarkan program dari pusat dibandingkan memproduksi konten lokal secara mandiri.

B. KAJIAN TEORI

2.1.1. Teori Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye (2012:1) menyatakan “*what ever government choose to do or not to do*”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.

2.1.1. Sejarah Industri Penyiaran Televisi Di Indonesia

Munculnya regulasi sistem stasiun jaringan (SSJ) tidak lepas dari perjalanan sejarah Industri penyiaran di Indonesia yang memunculkan berbagai macam persoalan. Indonesia

memang pada awalnya hanya mengenal satu stasiun televisi yang memonopoli penyiaran di Indonesia dalam waktu yang cukup lama yaitu TVRI. TVRI merupakan televisi milik pemerintah yang proyeknya dimulai ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games IV. Pembangunan stasiun TV berikut pemancarnya dilakukan untuk meliput kegiatan tersebut. Tanggal 25 Juli 1961 merupakan momen bersejarah karena pada saat itu Menteri Penerangan atas nama pemerintah mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T) yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya TVRI di Indonesia.

2.1.2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menurut Nielsen & Parker (2012) menjelaskan motif dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang meliputi motif ekonomi, sosial, dan normatif. Ketiga motif tersebut mendasari perilaku *manager* dan karyawan untuk melaksanakan

aktivitas bisnis tingkat individu, organisasi dan struktural dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi, mendapatkan pengakuan, dan mentaati aturan yang berlaku. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) secara umum menjelaskan tentang motivasi individu atau organisasi untuk melakukan perilaku kepatuhan (Nielsen & Parker, 2012).

2.1.3. Ekonomi Politik Media

Pendekatan ekonomi politik media merupakan salah satu perspektif penting dalam kajian komunikasi yang berfokus pada hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan produksi media. Pendekatan ini menekankan bahwa media tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi dan politik yang melingkupinya.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencatat setidaknya ada beberapa alasan mengapa televisi lokal jarang memproduksi konten lokal yang meliputi kurangnya dana untuk produksi, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya komitmen manajemen media untuk memperbaiki situasi, dan dominasi pasar yang lebih menguntungkan bagi

media besar (Juditha, 2015).

C. METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologi yang dialami pada diri individu. bertujuan menggali secara mendalam makna pengalaman personal subjek penelitian terhadap suatu fenomena, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, serta analisis data secara tematik melalui proses identifikasi pernyataan bermakna, penyusunan tema-tema pokok, dan penggambaran deskripsi pengalaman baik dari sisi isi (tekstural) maupun cara pengalaman itu terjadi (struktural) secara menyeluruh dan reflektif. Pendekatan fenomenologi digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pemaknaan para pelaku penyiaran terhadap implementasi kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), khususnya

dalam pemenuhan kewajiban konten lokal di wilayah layanan Banten pada KPID Provinsi Banten.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam implementasi kepatuhan konten lokal dalam kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan Banten pada KPID Provinsi Banten, antara lain:

1. Pihak lembaga penyiaran televisi berjaringan, Staf yang terlibat dalam penentuan kebijakan siaran.
2. Pihak regulator penyiaran daerah, Komisioner atau staf lembaga pengawas penyiaran (Komisioner KPID Banten) Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan konten siaran.
3. Akademisi atau pengamat media Praktisi penyiaran

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ada teknik yang dapat menunjang data atau informasi yang dibutuhkan seorang peneliti yaitu teknik pengumpulan data. Sugiyono dalam

bukunya berpendapat bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2012: 62). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

3.3.1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara Intensif. (Ardianto, 2011: 178) Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang terkait pada judul penelitian “Implementasi Kepatuhan Konten Lokal Pada Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) Di Wilayah Layanan Banten pada KPID Provinsi Banten”.

3.3.2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Jika wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terlepas pada orang, tetapi juga objek-

objek alam lain. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan penting yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. (Sugiyono, 2015: 145).

3.3.3. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini penulis menganut sistem kepastakaan terbuka dimana dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan mengenai masalah yang diteliti.

3.3.4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa (field note) yang sudah berlalu dan teknik pengambilan data ini menggunakan beberapa perangkat seperti kamera, dokumentasi dapat berupa gambar dari informan, Peneliti melakukan pengambilan berupa foto baik pada saat wawancara dengan para informan.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka diperlukan teknik langkah-langkah untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh. Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka mengetahui bagian-bagian,

hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dengan keseluruhan.

(Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2007:248). Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi, sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian mengenai implementasi kepatuhan konten lokal pada kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan Banten pada KPID Provinsi Banten.
2. Reduksi data: Kategorisasi dan reduksi data dilakukan dengan cara memilih serta memfokuskan pada informasi penting yang relevan dengan masalah penelitian. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan SSJ dan kepatuhan konten lokal.
3. Penyajian data: Penyajian data dilakukan dengan menginterpretasikan hasil temuan dari informan, kemudian disusun

secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap fenomena implementasi kepatuhan konten lokal dalam kebijakan SSJ.

4. Penarikan kesimpulan: Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah disusun dalam bentuk narasi, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian mengenai implementasi kepatuhan konten lokal pada kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan Banten pada KPID Provinsi Banten.

3.5. Keabsahan Hasil Penelitian

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

D. HASIL PENELITIAN

Analisis Implementasi Kebijakan (Model George C. Edwards III)

Implementasi kebijakan ialah tahapan strategis yang dilakukan setelah adanya proses perumusan

suatu kebijakan, dikarenakan pada tahap ini suatu kebijakan akan diuji, baik secara substantif maupun tingkat efektivitas penggunaannya (Dunn, 1994). Van Hater dan Van Hom dalam (Wahab, 2016) merumuskan proses implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

“Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dalam mengawasi implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah sangat krusial. KPI pusat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip dasar penyiaran, seperti keberagaman isi siaran (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*), dapat berjalan dengan baik”. Menurut Ubaidillah S.Sos, M.Pd selaku Ketua KPI Pusat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan konten lokal pada kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan Banten masih belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten, ditemukan

bahwa sebagian lembaga penyiaran televisi berjaringan telah memenuhi kewajiban penayangan konten lokal minimal 10%, namun pelaksanaannya masih bersifat administratif.

Konten lokal yang ditayangkan umumnya berupa program berita daerah, budaya lokal, dan informasi masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar program tersebut masih ditempatkan di luar waktu *prime time*, sehingga jangkauan audiensnya terbatas. Selain itu, kualitas produksi konten lokal dinilai belum mampu bersaing dengan program nasional yang diproduksi oleh pusat jaringan di Jakarta.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan SSJ. Lembaga penyiaran lebih memprioritaskan program yang memiliki potensi rating dan pendapatan iklan tinggi dibandingkan konten lokal yang dianggap kurang menguntungkan secara komersial.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, implementasi kebijakan SSJ di Banten dipengaruhi oleh empat faktor

utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, koordinasi antara KPI Pusat, KPID Banten, dan lembaga penyiaran dinilai belum optimal. Sosialisasi kebijakan sudah dilakukan, namun belum mampu menciptakan kesamaan persepsi mengenai pentingnya konten lokal sebagai bagian dari kepentingan publik.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran produksi, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan konten lokal berkualitas. Kondisi ini menyebabkan lembaga penyiaran cenderung memproduksi konten lokal secara minimalis.

Sementara itu, disposisi atau sikap lembaga penyiaran menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan SSJ masih didominasi oleh pertimbangan ekonomi. Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*), kondisi ini termasuk dalam kategori *calculative compliance*, yaitu kepatuhan yang dilakukan untuk menghindari sanksi administratif, bukan karena kesadaran

normatif.

Selain itu, struktur industri media yang terpusat di Jakarta menyebabkan konten lokal sulit berkembang. Dalam perspektif ekonomi politik media, fenomena ini menunjukkan adanya dominasi media nasional terhadap daerah, sehingga tujuan kebijakan SSJ untuk menciptakan keberagaman isi siaran belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, implementasi kepatuhan konten lokal pada kebijakan SSJ di wilayah layanan Banten masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun struktur industri media. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kolaborasi antar lembaga, serta dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan konten lokal yang berkualitas.

F. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kepatuhan konten lokal pada kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah layanan Banten, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SSJ belum berjalan optimal. Dominasi

konten nasional dari Jakarta masih membatasi ruang bagi produksi konten lokal, meskipun regulasi mewajibkan penayangan minimal 10% konten lokal.

Hambatan implementasi terlihat dari lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya produksi dan SDM lokal, serta rendahnya komitmen lembaga penyiaran terhadap pengembangan konten lokal. Kepatuhan lembaga penyiaran masih bersifat kalkulatif (calculative compliance), yaitu lebih didorong oleh upaya menghindari sanksi daripada kesadaran untuk mendukung keberagaman isi siaran dan identitas lokal Banten.

SARAN

Bagi KPID Banten

Meningkatkan pengawasan tidak hanya pada durasi konten lokal, tetapi juga kualitas isi siaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran.

Bagi Lembaga Penyiaran

Mengembangkan kerja sama dengan kampus dan komunitas lokal untuk memproduksi konten lokal yang lebih kreatif, edukatif, dan mencerminkan

budaya Banten.

Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur bagi pengembangan industri kreatif serta produksi konten lokal di Banten.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengkaji pengaruh televisi digital dan migrasi ASO terhadap perkembangan konten lokal dan sistem penyiaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, 2017. Media Komunikasi: Sejarah Televisi di Indonesia dan perkembangannya.

Andreazona. 2012. Sistem Basic Data. <http://iknow.apbgroup.com/studiodokumentasi/05> akses 27 Mei 2026

Armando. 2010. Mengapa Sistem TV Berjaringan harus dijalankan

Damaledo, Daniel. 2012. [Http://Etd.Repository.Ugm.c.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.c.Id/). Sistem Stasiun Jaringan Di Indonesia Analisis Kebijakan Dan Implementasi Tahun 2005 – 2010. Universitas Gajah Mada di

akses 12 Februari 2026

Djumena Erlangga. 2010. Konten adalah raja. <http://ekonomi.kompas.com/read/2010/06/03/10313449> di akses 20 Februari 2018

Creswell, J.W. 2014. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th ed. SAGE Publications, Inc.

Nancy 2015. Implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.